

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)

KOTA BANJAR TAHUN 2018

Bismillahirrahmananirraahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Banjar Tahun 2018 dapat tersusun. Penyusunan ILPPD ini merupakan perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2018 kepada masyarakat. Penyampaian Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat dan juga sebagai pemenuhan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, pokok-pokok materi ILPPD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

I. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1. Batas Administrasi, Luas Wilayah dan Letak Geografis

Berdasarkan aspek administrasi (penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat), Luas Wilayah Kota Banjar kurang lebih **113,49 km²** atau **11.349 hektar**. Sementara Berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal (sekarang Badan Informasi Geospasial) tahun 2003, luas wilayah Kota Banjar adalah **131,97 km²** atau **13.197,23 hektar**.

Batas wilayah Kota Banjar berdasarkan letak administrasi terdiri atas:

- ❖ **Sebelah Utara**, Berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis serta Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah;
- ❖ **Sebelah Timur**, Berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- ❖ **Sebelah Selatan**, Berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis;
- ❖ **Sebelah Barat**, Berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Secara geografis Kota Banjar terletak diantara **108°28'00" - 108°40'00" Bujur Timur** dan **07°19'30" - 07°26'30" Lintang Selatan** (berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal).

II. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data yang dipublikasikan berupa data hasil konsolidasi SIAK dengan Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Penduduk Kota Banjar Tahun 2018 adalah sebanyak 204.100 jiwa yang meliputi 102.198 jiwa laki-laki dan 101.902 jiwa perempuan.

**Tabel Data Penduduk Kota Banjar
Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Banjar	29.319	29.748	59.067
2	Pataruman	31.017	31.118	62.135
3	Purwaharja	12.321	12.135	24.456
4	Langensari	29.541	28.901	58.442
Total		102.198	101.902	204.100

Sumber: Disdukcapil Kota Banjar Tahun 2019

1.3 KONDISI EKONOMI

Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2017 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	Harga Berlaku		
	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	473.354,1	512.193,6	530.834,6
B Pertambangan dan Penggalian	10.035,3	10.174,7	9.931,4
C Industri Pengolahan	354.526,2	382.383,0	408.489,6
D Pengadaan Listrik & Gas	3.184,1	3.807,3	4.549,4
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.046,9	5.808,5	6.738,9
F Konstruksi Bangunan	327.880,3	348.679,4	389.858,6
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	902.194,9	963.664,1	1.046.686,9
H Transportasi dan Pergudangan	166.689,5	183.926,2	200.893,6
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81.013,0	92.308,5	104.239,2
J Informasi dan Komunikasi	134.404,0	153.479,6	173.862,3
K Jasa Keuangan dan Asuransi	123.431,2	138.359,1	148.446,7
L Real Estate	78.526,5	83.309,0	91.334,6
M,N Jasa Perusahaan	22.626,8	24.537,6	27.1104,4
O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	347.152,8	370.036,3	383.262,2
P Jasa Pendidikan	208.951,6	232.396,1	265.791,0
Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	74.048,0	84.902,2	95.403,8
R,S, T,U Jasa Lainnya	16.825,7	18.976,2	21.469,9
Total Produk Domestik Regional Bruto	3.329.891,0	3.608.941,5	3.908.897,1

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015 – 2017
Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	Harga Konstan		
	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	331.334,8	343.359,8	346.291,2
B Pertambangan dan Penggalian	7.259,8	7.280,8	7.349,1
C Industri Pengolahan	281.925,8	295.301,0	307.882,2
D Pengadaan Listrik & Gas	2.641,6	2.784,4	2.881,8
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.444,4	4.706,2	4.972,9
F Konstruksi Bangunan	256.229,7	268.682,5	293.069,9
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	748.478,5	784.605,1	821.549,7
H Transportasi dan Pergudangan	119.971,3	128.817,8	136.154,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66.814,0	73.165,9	79.501,0
J Informasi dan Komunikasi	140.524,3	160.242,2	178.009,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi	97.545,2	106.459,5	109.332,2
L Real Estate	70.532,0	73.840,0	79.713,3
M,N Jasa Perusahaan	19.253,1	20.385,0	22.084,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	238.257,8	247.216,3	247.531,3
P Jasa Pendidikan	168.930,4	184.066,5	199.859,9
Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	54.615,7	60.470,5	65.961,8
R,S, T,U Jasa Lainnya	15.478,3	16.698,0	18.259,0
Total Produk Domestik Regional Bruto	2.624.236,8	2.778.081,5	2.920.403,9

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

2.1 VISI DAN MISI

I. VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah :**“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”**

II. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
- 2) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**
- 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**
- 4) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya *good governance* dan *clean government***

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan daerah, Pemerintah Kota Banjar terlebih dahulu menetapkan isu-isu strategis melalui berbagai pertimbangan diantaranya yang merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota Banjar dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional, serta luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli masyarakat;
4. Meningkatkan kemandirian pangan;
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin;
6. Meningkatkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparat pemerintah terhadap hukum;
8. Meningkatkan kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan permasalahan diatas, Tema Pembangunan Kota Banjar Tahun 2018 adalah: ***“Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penataan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat”***

Berdasarkan Tema tersebut maka prioritas pembangunan Kota Banjar Tahun 2018 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis yang ada. Sasaran dan **Prioritas Pembangunan Kota Banjar Tahun 2018** adalah sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Banjar Tahun 2014-2018

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah	1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar;	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai	1) Pendidikan gratis sampai dengan jenjang SLTA;
	2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah;		
	3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal dan informal.		2) Menyelenggarakan pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan non formal dan informal;
2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	1. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan sejak dini	1. Meningkatkan cakupan layanan pendidikan anak usia dini	Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini	1) Meningkatkan pendidikan karakter untuk anak usia dini
4. Meningkatkan angka harapan hidup	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk menekan angka kematian bayi dan	1) Mendorong peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;
	2. Meningkatnya		2) Meningkatkan

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan	ibu melahirkan.	kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan;
	3. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.		3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan cakupan akseptor KB	Optimalisasi program KB dan kesehatan reproduksi	1) Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat;
			2) Meningkatkan kualitas pelayanan program KB.

Misi 2: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli masyarakat	1. Berkembangnya jumlah UMKM dan koperasi;	Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang terintegrasi, tepat sasaran dan berkelanjutan;	1) Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing UMKM/Koperasi;
	2. Meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan;		2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM;
	3. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan;		3) Meningkatkan kapasitas iptek sistem produksi;
	4. Meningkatkan realisasi investasi;	Meningkatkan daya tarik investasi daerah	4) Meningkatkan pangsa pasar produk-produk UMKM;
	5. Meningkatnya kontribusi sektor sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;	Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kualitas kemampuan petani	1) Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi;
	6. Meningkatnya ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata	Meningkatkan ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata	1) Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
	7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Banjar	1) Membangun rintisan dan mengembangkan daerah agrowisata
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin	1. Meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga pra sejahtera;	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bidang ekonomi	1) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menuju Banjar Agropolitan
	2. Menurunnya populasi PMKS;		1) Menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
	3. Meningkatkan		2) Meningkatkan Kemandirian keluarga pra sejahtera dan para penyandang masalah sosial (PMKS);
			3) Mengembangkan

Misi 2: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	penempatan bagi pencari kerja;		ekonomi padat karya;

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan udara dan air	1. Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) yang proporsional;	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	1) Menata Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kebutuhan RTH Kota.
	2. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota;	Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	1) Mengembangkan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;	Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih dan penataan kawasan kumuh	1) Peningkatan Lingkungan Pemukiman Sehat
	4. Meningkatnya mutu pengawasan lingkungan hidup;	Meningkatkan pengawasan lingkungan hidup	1) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan LH
	5. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan.	Meningkatkan fungsi dan grade hutan dan lahan	1) Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi Hutan dan Lahan

Misi 4: Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah.	1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum	1) Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah di bidang hukum
	2. Meningkatnya Disiplin Pegawai		2) Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan
			3) Meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban di kota Banjar
2. Terwujudnya kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	1. Meningkatnya aparat pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan layanan prima;	Meningkatkan kompetensi SDM aparat dan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat	1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat; 2) Menyediakan sarana prasarana pelayanan publik berdasarkan SPM
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;	Meningkatkan pelayanan perpustakaan	1) Meningkatkan sistem administrasi perpustakaan
			2) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca;
	3. Meningkatnya	Mengimplemen-	3) Pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana perpustakaan. 4) Meningkatkan SPIP dan

Misi 4: Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	peran pengawasan;	tasikan SPIP	pengelolaan keuangan daerah
	4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;		
	5. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan;	Meningkatkan kualitas produk penataan ruang dan perencanaan yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan di Kota Banjar	1) Meningkatkan kualitas produk penataan ruang dan perencanaan dengan dukungan data yang update dan sesuai dengan per-UU yang berlaku
	6. Tersedianya data, informasi dan statistik pembangunan daerah;	Meningkatkan kualitas pemuktahiran data	1) Meningkatkan kerjasama dengan BPS, lembaga pendidikan dan Survey secara berkala

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota Banjar melaksanakan urusan konkuren sebanyak 23 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan serta urusan pemerintahan umum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan dari seluruh urusan wajib dan urusan pilihan tersebut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Banjar.

3.1 URUSAN KONKUREN

I. RINGKASAN URUSAN WAJIB

NO	URUSAN / OPD PENYELENGGARA	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA %
1	Pendidikan	181.422.720.126,16	160.243.532.411,00	88,33
	a Disdikbud	181.422.720.126,16	160.243.532.411,00	88,33
2	Kesehatan	203.597.009.339,24	148.808.943.583,00	73,09
	a Dinas Kesehatan	63.752.927.382,94	35.284.959.736,00	55,35
	b BLUD RSU	139.054.345.956,30	112.796.016.437,00	81,12
	c Kec. Banjar	228.007.000,00	227.949.500,00	99,97
	d Kec. Pataruman	181.108.500,00	165.417.160,00	91,34
	e Kec. Langensari	178.154.000,00	139.249.250,00	78,16
	f Kec. Purwaharja	202.466.500,00	195.351.500,00	96,49
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167.045.547.756,84	163.144.579.419,00	97,66
	a Dinas PUPRPKP	167.045.547.756,84	163.144.579.419,00	97,66
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	15.599.350.000,00	15.121.574.850,00	96,94
	a Dinas PUPRPKP	15.240.000.000,00	14.769.900.400,00	96,92
	b BPBD	339.350.000,00	331.674.450,00	97,74
	c D LH	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5	Trantibumlinmas	14.477.278.921,20	13.299.013.146,00	91,86
	a Dinas Satpol PP	10.977.553.583,20	10.103.262.145,00	92,04
	b DPMDKPOL	380.000.000,00	372.976.871,00	98,15
	c BPBD	2.870.716.838,00	2.605.990.936,00	90,78
	d Setda	250.000.000,00	231.581.860,00	92,63
	e Kec. Banjar	45.560.000,00	45.560.000,00	100,00

	f	Kec. Pataruman	26.764.500,00	19.898.850,00	74,35
	g	Kec. Langensari	10.977.553.583,20	10.103.262.145,00	92,04
6		Sosial	11.581.474.185,60	11.139.994.301,00	96,19
	a	Dinsos P3A	8.630.574.185,60	8.231.990.951,00	95,38
	b	Setda (Bagian Kesra)	2.950.900.000,00	2.908.003.350,00	98,55
7		Lingkungan Hidup	24.730.237.830,00	22.687.265.663,00	91,74
	a	D LH	24.712.045.330,00	22.669.372.663,00	91,73
	b	Kec. Langensari	18.192.500,00	17.893.000,00	98,35
8		Pemuda dan Olahraga	7.140.177.567,40	6.752.310.852,00	94,57
	a	Dispota	7.103.955.567,40	6.719.081.802,00	94,58
	b	Kec. Banjar	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	c	Kec. Pataruman	24.222.000,00	21.229.050,00	87,64
9		Penanaman Modal	4.835.668.672,28	4.433.955.426,00	91,69
	a	DPMPTSP	4.599.472.772,28	4.236.398.376,00	92,11
	b	Setda (Bagian Ekbangjas)	236.195.900,00	197.557.050,00	83,64
10		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.667.045.042,40	7.244.701.740,00	94,49
	a	Dinas KUKMP	7.667.045.042,40	7.244.701.740,00	94,49
11		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	5.783.662.781,28	5.347.259.563,00	92,45
	a	Disdukcapil	5.783.662.781,28	5.347.259.563,00	92,45
12		Ketenagakerjaan	3.995.554.824,00	3.633.617.748,00	90,94
	a	Disnaker	3.995.554.824,00	3.633.617.748,00	90,94
13		Pangan	16.106.435.542,96	15.180.937.058,00	94,25
	a	DKPPP	16.038.576.542,96	15.114.083.558,00	94,24
	b	Kec. Banjar	40.244.000,00	39.962.000,00	99,30
	c	Kec. Pataruman	27.615.000,00	26.891.500,00	97,38
14		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	370.560.000,00	364.095.900,00	98,26
	a	Dinsos P3A	370.560.000,00	364.095.900,00	98,26
15		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.941.190.547,00	8.171.563.574,00	91,39
	a	DPPKB	7.546.424.547,00	6.797.146.024,00	90,07
	b	Setda (Bagian Kesra)	23.950.500,00	23.642.950,00	98,72
	c	Kec. Banjar	511.749.000,00	511.736.250,00	100,00
	d	Kec. Pataruman	357.607.500,00	356.444.350,00	99,67
	e	Kec. Langensari	256.070.000,00	241.070.000,00	94,14
	f	Kec. Purwahaarja	245.389.000,00	241.524.000,00	98,42
16		Perhubungan	6.991.063.816,44	6.345.640.651,00	90,77
	a	Dishub	6.991.063.816,44	6.345.640.651,00	90,77
17		Komunikasi dan Informatika	4.220.433.451,66	3.855.126.704,00	91,34
	a	Diskominfo	3.279.304.371,66	2.915.010.854,00	88,89
	b	Setda	941.129.080,00	940.115.850,00	99,89
18		Pertanahan	785.000.000,00	757.222.650,00	96,46
	a	DPUPRPKP	785.000.000,00	757.222.650,00	96,46
19		Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.185.537.864,72	3.912.390.777,00	93,47
	a	DPMDKPOL	3.908.139.794,72	3.637.058.427,00	93,06
	b	Setda	257.660.570,00	256.124.850,00	99,40
	c	Kec. Banjar	3.427.500,00	3.427.500,00	100,00
	d	Kec. Pataruman	16.310.000,00	15.780.000,00	96,75
	e	Kec. Purwahaarja	3.908.139.794,72	3.637.058.427,00	93,06
20		Kebudayaan	797.169.000,00	785.577.550,00	98,55
	a	Disdikbud	697.300.000,00	694.536.650,00	99,60
	b	Kec. Banjar	47.473.000,00	47.451.500,00	99,95
	c	Kec. Langensari	24.050.000,00	15.279.400,00	63,53
	d	Kec. Purwahaarja	28.346.000,00	28.310.000,00	99,87
21		Statistik	1.789.666.200,00	1.760.837.950,00	98,39
	a	Setda	20.000.000,00	17.102.000,00	85,51
	b	Kec. Banjar	20.466.600,00	20.437.800,00	99,86
	c	Kec. Pataruman	710.524.000,00	710.423.750,00	99,99
	d	Kec. Langensari	507.048.000,00	498.940.800,00	98,40
	e	Kec. Purwahaarja	233.664.600,00	216.373.600,00	92,60
22		Kearsipan	3.250.905.380,64	2.948.992.809,00	90,71
	a	DKP	3.250.905.380,64	2.948.992.809,00	90,71
23		Perpustakaan	121.500.000,00	120.438.800,00	99,13
	a	DKP	121.500.000,00	120.438.800,00	99,13
JUMLAH TOTAL URUSAN WAJIB			695.435.188.849,82	606.059.573.125,00	87,15

II. RINGKASAN URUSAN PILIHAN

NO	URUSAN/OPD PENYELENGGARA	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	CAPAIAN KINERJA%
1	Kelautan dan Perikanan	275.000.000,00	274.980.000,00	99,99
	A DKPPP	275.000.000,00	274.980.000,00	99,99
2	Pertanian	263.525.000,00	258.960.300,00	98,27
	A DKPPP	200.000.000,00	197.884.500,00	98,94
	B Kec. Langensari	31.455.000,00	29.297.800,00	93,14
	C Kec. Purwahaarja	32.070.000,00	31.778.000,00	99,09

3	Pariwisata	405.000.000,00	397.333.450,00	98,11
	A Dispora	405.000.000,00	397.333.450,00	98,11
4	Perindustrian	298.000.000,00	294.820.200,00	98,93
	A DKUKMP	298.000.000,00	294.820.200,00	98,93
5	Perdagangan	1.103.000.000,00	1.092.888.500,00	99,08
	A DKUKMP	1.103.000.000,00	1.092.888.500,00	99,08
6	Transmigrasi	32.950.000,00	30.647.267,00	93,01
	A Disnaker	32.950.000,00	30.647.267,00	93,01
TOTAL URUSAN PILIHAN		2.377.475.000,00	2.349.629.717,00	98,83

3.2 RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN / OPD PENYELENGGARA	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA%
1	Fungsi Lainnya	69.416.395.112,18	63.068.243.050,00	90,85
	a Kepala Daerah dan Wakil	586.928.172,00	425.537.763,00	72,50
	b Setda	24.121.588.626,52	21.002.181.044,00	87,07
	c Setwan	25.417.014.047,00	23.858.191.541,00	93,87
	d Kec. Banjar	5.550.751.811,60	5.163.617.349,00	93,03
	e Kec. Pataruman	4.819.462.767,00	4.423.080.129,00	91,78
	f Kec. Langensari	4.600.416.474,00	4.197.288.552,00	91,24
	g Kec. Purwahaarja	586.928.172,00	425.537.763,00	72,50
2	Pengawasan (Fungsi Lainnya)	5.765.083.480,70	5.232.275.735,00	90,76
	a Dinas Satpol PP	110.000.000,00	109.995.500,00	100,00
	b Setda	167.000.000,00	159.374.400,00	95,43
	c Kec. Banjar	36.672.000,00	36.667.000,00	99,99
	d Inspektorat	5.451.411.480,70	4.926.238.835,00	90,37
3	Perencanaan	10.046.014.209,80	9.302.254.930,00	92,60
	a Setda	309.556.026,00	305.411.000,00	98,66
	b Kec. Banjar	122.547.000,00	122.532.000,00	99,99
	c Kec. Pataruman	104.092.500,00	100.432.490,00	96,48
	d Kec. Langensari	96.332.000,00	90.807.600,00	94,27
	e Kec. Purwahaarja	89.115.000,00	89.072.000,00	99,95
	f BAPPEDA	9.324.371.683,80	8.593.999.840,00	92,17
4	Keuangan	124.221.797.270,00	110.824.175.469,00	89,21
	a Setda	763.000.000,00	760.948.450,00	99,73
	b Kec. Banjar	72.667.000,00	72.667.000,00	100,00
	c Kec. Pataruman	66.061.500,00	64.061.500,00	96,97
	d Kec. Langensari	49.118.000,00	45.268.285,00	92,16
	e Kec. Purwahaarja	33.081.500,00	33.081.500,00	100,00
	f BPPKAD	123.237.869.270,00	109.848.148.734,00	89,14
5	Kepegawaian	6.837.150.130,50	6.216.761.815,00	90,93
	a Setda	26.000.000,00	22.958.600,00	88,30
	b Kec. Banjar	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	c BKPPD	123.237.869.270,00	109.848.148.734,00	89,14
6	Penelitian dan Pengembangan	375.492.950,00	375.061.575,00	99,89
	a Kec. Langensari	6.844.000,00	6.827.000,00	99,75
	b Kec. Purwahaarja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	c BAPPEDA	392.000.000,00	381.472.500,00	97,31
TOTAL FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		217.053.933.153,18	195.400.245.074,00	90,02

3.3 RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

NO	URUSAN / OPD PENYELENGGARA	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DPMDKPOL	108.000.000,00	107.854.066,00	99,86
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		108.000.000,00	107.854.066,00	99,86

3.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

I. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah;

- Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dan Perwal No 8 Tahun 2017 ttg Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan. Rasio rumah ber IMB 35,86%. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033.

- b. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, telah dilakukan restrukturisasi pelayanan KTP menjadi 1 (satu) hari dengan tanpa biaya/ gratis. Penduduk wajib ber-KTP dan sudah terekam e-KTP pada akhir tahun 2018 tercatat 98,03%.
- c. Ketersediaan aparat Tramtibum tercatat sebanyak 65 orang personil Satpol PP, Keberadaan PKL dan kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pedagang Kaki Lima, Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Banjar, Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Perda Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar.

2. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah;

LPPD Tahun 2018 disampaikan tanggal 27 Maret 2019, Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018 telah disampaikan tanggal 29 Maret 2019, Laporan Kinerja 2019 disampaikan tanggal 29 Maret 2019. Sebagai wujud komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah telah menetapkan SPM. Untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Banjar menjalin hubungan kerjasama, tahun 2018, sebanyak 47 perjanjian Kerjasama.

3. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah;

5 program prioritas pembangunan nasional, seluruhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjar dengan melaksanakan seluruh 24 urusan pemerintahan wajib yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 atau sejumlah 100%. Perda nomor 11 tahun 2017 tentang APBD Kota Banjar Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2017. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan anggaran untuk belanja pelayanan dasar sebesar 64,70% dari total belanja APBD. Dari total belanja pelayanan dasar tersebut 42,08% diantaranya adalah belanja untuk pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, Pemerintah Kota Banjar telah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jumlah SKPD di Pemerintah Kota Banjar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebanyak 29 unit dengan jumlah PNS sebesar 2.545 atau memiliki rasio sebesar 1,25% dari jumlah penduduk Kota Banjar. Data PNS tersebut, seluruhnya telah terekam dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

4. Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan DPRD;

Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat dan menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing, hal ini dapat dilihat dari Perda yang dihasilkan bersama. Adapun Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 Perda.

5. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan;

Keputusan yang telah dihasilkan Oleh DPRD selama Tahun 2018 adalah sebanyak 25 keputusan, dan semuanya ditindaklanjuti oleh DPRD dengan capaian 100%

6. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan;

Keputusan Walikota yang diterbitkan selama tahun 2018 adalah sebanyak 360 keputusan dan jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 adalah sebanyak 360 keputusan dan semuanya ditindaklanjuti. Dan jumlah Peraturan Walikota yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 74 peraturan dan semuanya ditindaklanjuti. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja pada aspek ini adalah sebesar 100 %.

7. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan;

Terkait dengan semua Perda yang sudah ditetapkan tidak ada satupun yang dibatalkan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, baik karena inisiatif legislatif, eksekutif maupun oleh masyarakat. Sedangkan jumlah Perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 4 Perda.

8. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah;

Dalam Perda Nomor 28 tahun 2006 tentang Musyawarah Pembangunan Daerah Musyawarah Pembangunan Daerah, salah satu pasalnya mengatur bahwa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan harus dikonsultasikan dulu kepada masyarakat.

Pemerintah Kota menyediakan media komunikasi yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh seluruh masyarakat, diantaranya dengan website www.banjarkota.go.id dan Radio Suara Husada (Dinkes). Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam Pemerintahan dan pembangunan Daerah

9. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil;

Tingkat penyerapan dana perimbangan mencapai 98,8% jika dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan, alokasi belanja publik yang mencapai 116,63 % dibanding dengan alokasi yang ada pada Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan alokasi belanja langsung mencapai 46,93% dari total belanja APBD Kota Banjar tahun 2018.

10. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah;

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini mencapai sebesar 14,52% jika dibandingkan dengan keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kota Banjar tahun 2018.

11. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD;

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah selama 2 tahun terakhir adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini dapat dimaknai bahwa dalam pengelolaan keuangan Daerah Kota Banjar masih dalam koridor kewajaran tanpa terjadi penyimpangan yang berarti.

Besaran SILPA Kota Banjar mencapai sebesar 10,44% jika dibandingkan dengan keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kota Banjar tahun 2018. Besaran Realisasi Belanja pada tahun 2018 mencapai 87,86%.

Tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan keuangan di Kota Banjar mencapai 94,67%, artinya semua temuan selalu ditindak lanjuti dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

12. Pengelolaan Potensi Daerah;

Capaian realisasi PAD tahun 2018 mencapai 155,50%, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2018 PAD Kota Banjar mengalami penurunan sebesar 7,40%.

13. Terobosan/Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh Pemerintah Kota Banjar sebanyak 14 Penghargaan. Pemerintah Kota Banjar sejak 2012 telah melaksanakan Layanan pengadaan elektronik, tapi masih menggunakan situs LPSE Provinsi Jawa Barat (dishubkominfo Jawa Barat). Pada tahun 2013 membentuk ULP barang dan jasa dimana telah menggunakan e-procurement dalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan E-Procurement yang dilaksanakan oleh Bagian Ekbangjas Setda Kota Banjar berdasarkan Perwal Nomor 30 Tahun 2016, yang melaksanakan rekapitulasi pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui website lpse.banjar.go.id

Disamping itu dalam peningkatan daya saing daerah, maka aspek investasi menjadi bagian penting. Secara kuantitatif jumlah persetujuan investasi lebih dari yang dapat dilayani selama tahun 2018 mencapai 2.544 ijin dengan jumlah izin investasi PMDN nilai investasinya sama atau lebih dari Rp. 200.000.000,00 sebanyak 109 ijin.

II. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

A. URUSAN KONKUREN

a. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,05%
2	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	99,21%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,42%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	107,92%
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,07%
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	113,59%
10	Guru yang memiliki Kualifikasi S-1/D-IV	94,41%

2. Urusan Kesehatan

NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	117,28%
2	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	100%

3	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100%
5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan TBA	96,12 %
6	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100 %
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	99,86 %
8	Cakupan Kunjungan Bayi	117,60 %

3. Urusan Lingkungan Hidup

- a) volume sampah yang ditangani sebesar 167.617.125 m³ dari jumlah produksi sampah yang dihasilkan sebesar 167.617.125 m³ atau sebesar 100 %.
- b) Jumlah pasar yang ada di Kota Banjar sebanyak 3 pasar dan kriteria pasar yang tergolong baik sejumlah 3 pasar dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- c) Daya tampung TPS dibandingkan dengan jumlah penduduk (produksi sampah) sebesar 2,53 m³ per 1000 penduduk.
- d) Dalam tahun 2018 di Kota Banjar tidak terdapat kasus lingkungan, dengan capaian (100%)

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik, dari keseluruhan jalan kota sepanjang 217,24 km, 236,32 km atau sebesar 91,93% berada dalam kondisi baik.
- b) Luas irigasi kota dalam kondisi baik sebesar 68,34% berada dalam kondisi baik
- c) Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 68.356 yang sudah memenuhi standar sanitasi mencapai 69.364 atau sebesar 98,55 %
- d) Dari 13.197,32 Ha luas wilayah Kota Banjar, masih terdapat kurang lebih 11,99Ha wilayah yang masuk dalam kategori kumuh, atau sebesar 0,09%
- e) Ruang terbuka hijau sebesar 704,86 per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 2.908,15, atau sebesar 24,24%

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 98,50 % dengan perhitungan rumah tangga pengguna air bersih yaitu 68.324 dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga yaitu 69.364
- b) Lingkungan permukiman kumuh mencapai 1,42% dengan perhitungan adanya 187,95 luas lingkungan permukiman kumuh dibanding luas wilayah kota yaitu 13.197,32
- c) Rumah layak huni mencapai 98,29 % dengan perhitungan banyaknya jumlah rumah layak huni sebanyak 60.024 dibanding jumlah seluruh rumah di wilayah Kota Banjar yaitu 61.071

6. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Gelanggang atau balai remaja yang dimiliki Kota Banjar (selain milik swasta) mencapai 0,11 per 1000 penduduk dengan perhitungan 23 gelanggang dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 204.100 dikalikan 1000

- b) Lapangan olahraga mencapai 1,63 per 1000 penduduk dengan perhitungan adanya 332 lapangan olahraga dibandingkan jumlah penduduk yaitu 204.100 dikalikan 1000

7. Urusan Penanaman Modal

Prosentase besarnya **kenaikan nilai realisasi** PMDN mencapai 153,13% dengan rumusan, perbandingan antara selisih realisasi tahun 2018 dengan tahun 2017 dibanding realisasi PMDN tahun 2017. Adapun besaran perhitungan tersebut adalah :

$$(268.329.205.785-106.003.887.832)/106.003.887.832 \times 100\%$$

8. Urusan Koperasi Dan UKM

- a) Koperasi aktif mencapai 97,53% dengan perhitungan 79 Koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi yaitu 81
- b) Usaha Mikro mencapai 100 % dengan perhitungan 8.258 usaha mikro dibagi dengan jumlah seluruh Usaha Mikro yaitu 8.258

9. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

- a) Kepemilikan KTP mencapai 97,29% dengan perhitungan 145.954 penduduk yang memiliki KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP yaitu 150.020
- b) Kepemilikan akta kelahiran mencapai 479,77 per 1000 orang dengan perhitungan 97.922 penduduk memiliki akte kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 204.100 dikalikan 1000
- c) Telah diterapkannya KTP Nasional berbasis NIK dengan indikator telah dilaksanakannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

10. Urusan Ketenagakerjaan

- a) Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh mencapai 87,73% dengan perhitungan 13.211 jumlah pekerja/buruh peserta jaminan sosial aktif dibandingkan dengan jumlah pekerja/buruh yaitu 15.058
- b) Pencari kerja yang ditempatkan mencapai 57,36% dengan perhitungan 1.897 pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar yaitu 3.307

11. Urusan Pangan

- a) adanya regulasi ketahanan pangan sebagai Indikator Kinerja Kunci,
- b) ketersediaan pangan utama sebesar 61.342.000 Kg per 1000 penduduk didasarkan pada rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) sebesar 300.548,75 Kg dibanding jumlah penduduk 204.100 dikalikan 1000 penduduk

12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Jumlah Pekerja perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah yang tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3.281 dari 16.737 pekerja perempuan di Kota Bnjar atau sebesar 19,60%
- b) Pada tahun 2018 tercatat 78.667 anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf, dari jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun sebanyak 79.279 anak atau sebesar 99,23%

- c) Dalam tahun 2018 tercatat sebanyak 17.058 orang partisipasi angkatan kerja perempuan, dan 24.150 angkatan kerja perempuan atau sebesar 72,27%

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Dalam tahun 2018 tercatat sebanyak 26.505 peserta KB aktif atau sebesar 79,64 % jika dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang tercatat sebanyak 33.281.
- b) Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh (PLKB/PKB) disetiap desa dan Kelurahan sebesar 84,00 % dengan perincian jumlah Kelurahan sebanyak 25 Kelurahan dengan jumlah petugas sebanyak 21 orang dikarenakan ada pegawai yang pension.

14. Urusan Perhubungan

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 110.683 penumpang, sementara jumlah armada angkutan darat sebanyak 336.072, sehingga dengan demikian capaian ini sebesar 32,93 %.

15. Urusan Komunikasi dan Informasi

Tersedianya website Pemerintah Daerah yaitu www.banjarkota.go.id, dan Penyelenggaraan pameran atau expo pada tahun 2018 sebanyak 21 kali.

16. Urusan Pertanahan

- a) Luas lahan bersertifikat, dalam tahun 2018 tercatat seluas 902.732m² bidang tanah yang dapat diselesaikan administrasi sertifikatnya atau sebesar 69,04 % dari lahan yang seharusnya dapat disertikatkan seluas 1.307.572,58 m² (**tidak termasuk jalan**).
- b) Pada tahun 2018 tidak terdapat kasus tanah negara.
- c) Dalam tahun 2018 terdapat 3 permohonan untuk izin lokasi dan 3 yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku, atau tingkat capaian sebesar 100%

17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Dalam tahun 2018 tercatat PKK aktif sebanyak 1.799 orang anggota kader PKK dan semuanya termasuk dalam kategori aktif 100 %.
- b) Sedangkan jumlah Posyandu aktif adalah 199 unit dari 199 Posyandu yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat atau sebesar 100%.

18. Urusan Sosial

- a) Dalam tahun 2018 di Kota Banjar terdapat sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sebagainya sebanyak 5 buah.
- b) Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 99,60%, dengan perincian Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun sejumlah 996 orang berbanding Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun sejumlah 1.000 orang.

- c) Dalam tahun 2018 tercatat sebanyak 7.128 penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya 7.132 atau sebesar 99,94% mendapat bantuan social.

19. Urusan Kebudayaan

- a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, dalam tahun 2018 sebanyak 6 kali
- b) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya sebanyak 3 tempat
- c) Tahun 2018 terdapat 25 benda cagar budaya yang dilestarikan dari 25 yang ada, atau sebanyak 100%

20. Urusan Statistik

Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2018 telah dapat menyusun buku “Banjar dalam Angka” dengan judul Profil Kota Banjar Berbasis Geografis dan buku “PDRB Kota Banjar” oleh BPS Kota Banjar.

21. Urusan Kearsipan

- a) Seluruh Perangkat Daerah Kota Banjar pada tahun 2018 telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku yaitu sebanyak 29 Perangkat Daerah atau sebesar 100%
- b) Kegiatan peningkatan SDM dalam pengelolaan kearsipan tahun 2018 sebanyak 11 kegiatan.

22. Urusan Perpustakaan

- a) Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Daerah sampai dengan tahun 2018 berjumlah 8.183 buah dari jumlah koleksi buku yang tersedia mencapai sebanyak 9.211 buah atau mencapai 97,14%.
- b) Pengunjung perpustakaan, pada tahun 2018 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjar mampu menarik minat pengunjung sebanyak 33.190 orang dan target yang harus dilayani yaitu sebesar 35.082 orang, atau mencapai 94,61%.

b. Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

- a) Jumlah produksi Ikan di Kota Banjar untuk tahun 2018 sebanyak 2.802,79 ton, target yang ditetapkan sebesar 2.600 ton atau mencapai 107,80%
- b) Jumlah konsumsi ikan dalam tahun 2018 oleh masyarakat tercatat sebesar 2.811.408 kg dari target daerah sebesar 1.435.730 kg 195,82%

2. Urusan Pertanian

- a) Dari produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya berbanding luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya yaitu sebesar 7,29 ton/ha.
- b) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2018 berdasarkan harga berlaku sebesar 13,58%

3. Urusan Pariwisata

- a) Kunjungan Wisatawan pada tahun 2018 mencapai 152.682 orang
- b) Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata tahun 2018 berdasarkan harga berlaku sebesar 2,67%.

4. Urusan Industri

- a) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2018 10,45%
- b) Pertumbuhan Industri, Rata-rata pertumbuhan Industri yang ada di Kota Banjar tahun 2018 sebesar 0,85 %, yang didapat dari jumlah industri tahun 2018 dikurangi jumlah industri tahun 2017 dibagi industri tahun 2018 dikali 100% $(3.043-3.017)/3.043 \times 100\%$

5. Urusan Perdagangan

- a) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2018 berdasarkan harga berlaku Kota Banjar sebesar 26,78 %
- b) Nilai ekspor bersih Kota Banjar tahun 2018 sebesar US\$36.933.441,51- 0 = US\$36.933.441,51

6. Urusan Transmigrasi

Pada tahun 2018, Kota Banjar tidak ada/tidak mendapat kuota Transmigrasi.

B. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- a) Tersedianya/adanya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009
- b) Tersedianya/adanya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Banjar tahun 2014-2018
- c) Tersedianya/adanya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar tahun 2018
- d) Terjabarkannya Program RKPD 166 Program dengan program yang harus dilaksanakan pada Tahun 2018 sesuai RPJMD adalah mencapai 178 Program atau 93,26%
- e) Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah, yang pada tahun 2018 mencapai 20 aplikasi
- f) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk survey IKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar, dan berdasarkan survey kepuasan layanan masyarakat di Kota Banjar dalam kategori baik dengan nilai 76,31.

C. URUSAN PEMERINTAHAN

- a) Tahun 2018 telah dilakukan pembinaan politik masyarakat sebanyak 9 kali
- b) Tahun 2018 telah dilakukan kegiatan pembinaan sebanyak 9 kegiatan.

III. PRESTASI DAERAH

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018 terdiri dari:

NO.	PEMBERI PENGHARGAAN	BIDANG	TANGGAL PENGHARGAAN
1	Kemenpan RB	Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan Predikat nilai B bersama 62 Kota/Kabupaten lainnya.	25 Januari 2018
2	Gubernur Jawa Barat	Kota Banjar meraih Juara III pada Sayembara dalam Karnaval Kategori Umum Pada Asian African Carnival di Bandung, yang menampilkan Jurig Sarengseng	01 April 2018
3	Kementerian Dalam	Penghargaan Prestasi Kinerja dengan	25 April 2018

	Negeri	Status Sangat Tinggi Bintang Dua (**) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016	
4	Kementerian Keuangan	penghargaan Treasury Award yang digelar bersama Kota/ Kabupaten dan Desa di wilayah Jawa Barat.	18 Mei 2018
5	BPK RI Perwakilan Jawa Barat	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 oleh BPK-RI perwakilan Jawa Barat	28 Mei 2018
6	Gubernur Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM- PTSP) Kota Banjar meraih Prestasi sebagai Harapan II terbaik Kota tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	31 Mei 2018
7	Gubernur Jawa Barat	Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar meraih Juara I Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat kategori Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat;	31 Mei 2018
8	Presiden dan Menko PMK RI	Penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan atas komitmen dan kinerja kepala daerah di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	06 Juli 2018
9	Gubernur Jawa Barat	Penghargaan Bidang KB- KR kategori pengelola KB pria dalam rangka Peringatan Harganas xxv Tingkat Provinsi Jawa Barat, A/n Rika Setiawati	11 Juli 2018
10	Menteri PPPA	Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2018	23 Juli 2018
11	Gubernur Jawa Barat	Penghargaan Juara Harapan II Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Award Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat Di Bandung	15 Agustus 2018
12	Menteri Keuangan	Penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjar yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Daerah 8 kali	20 September 2018
13	Kanwil Ditjen Pembendaharaan Prov. Jabar	Penghargaan atas LKPD Kota Banjar Tahun 2017 dengan Pencapaian Standar Tertinggi opini WTP 7 kali berturut-turut sejak tahun 2011 sampai 2017 dari BPK RI,	31 Oktober 2018
14	Gubernur Jawa Barat	Wali Kota Banjar menerima Piagam Penghargaan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Walikota Banjar masa jabatan 2013-2018	04 Desember 2018
15	Kemenkumham	Penghargaan sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang peduli terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2018 tercatat sudah lima kali dianugerahi predikat sebagai Kota Peduli Hukum dan HAM	11 Desember 2018
16	Menteri PPPA	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Utama 2018, di Jakarta..	19 Desember 2018